



LAMPIRAN

**TABEL INDUK**

Sampel Berita	Kebenaran			Ket	Relevansi			Ket	Netralitas			Ket	Keseimbangan			Ket
	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C	
Sampel 1	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M
Sampel 2	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M
Sampel 3	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M
Sampel 4	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M	✓	x	✓	TM	✓	✓	✓	M
Sampel 5	✓	✓	✓	M	✓	x	✓	TM	✓	x	✓	TM	x	x	x	TM
Sampel 6	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M	x	✓	x	TM
Sampel 7	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M
Sampel 8	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M
Sampel 9	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M	✓	✓	✓	M

Keterangan : (M) = Menerapkan (TM) = Tidak Menerapkan

## Definisi Kategorisasi Objektivitas

No	Dimensi	Kategori	Indikator	Operasional
1	Kefaktualan	Kebenaran	Fakta	<p><b>Fakta Sosiologis :</b> Pemberitaan yang bahan bakunya berupa peristiwa/kejadian nyata/faktual yang di peroleh dari lapangan.</p> <p>Contoh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin beserta jajaran <u>mengadakan silaturahmi</u> dengan Kalpori Jenderal Polisi Tito Karnavian <u>di kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (18/11).</u></li> </ol>
			Akurasi	<p><b>Fakta Psikologis :</b> Berita yang bahan bakunya berupa intepretasi subjektif (pernyataan/opini) terhadap fakta kejadian/gagasan. Apakah berita yang disajikan hanya berisi komentar atau opini seseorang tentang suatu fakta atau peristiwa.</p> <p>Contohnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Persaingan cukup kompetitif. Tentu saja, kandidat yang berhasil merebut <i>swing voters</i> kami anggap angkanya cukup besar, mereka yang akan berjaya," ujar Direktur Eksekutif dan Riset Poltracking Indonesia Hanta Yuda saat merilis hasil survei terbaru Pilkada DKI Jakarta 2017 di Jakarta, Ahad (27/11).</li> </ol> <p><b>Dapat Dilakukan Cek &amp; Recheck :</b> Akurasi itu meliputi ketepatan mengutip sumber berita maupun data dan fakta, yang dimana sumber berita tersebut jelas dan adanya data-data yang mendukung. Hal ini diperlukan agar pembaca memperoleh gambaran dari mana informasi didapat dan apa bisa dipercaya atau tidak. Serta digunakan check and recheck dengan mengkonfirmasi/menguji kebenaran dan ketepatan fakta kepada subjek,objek, atau saksi berita sebelum disajikan.</p> <p>Contohnya :</p>

				<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberitaan mengenai <u>proses hukum Ahok</u> yang di sampaikan oleh Kalpori Jenderal Tito Karnavian.</li> <li>2) Pemberitaan <u>klarifikasi kasus Ahok</u> yang disampaikan oleh Ketua Tim Penasihat Hukum Ahok, Trimoelja Soerjadi.</li> </ol>
				<p><b>Significance :</b> Adalah seberapa penting fakta yang disampaikan dapat mempengaruhi kehidupan orang dan berakibat terhadap kehidupan khalayak pembaca.</p> <p><b>Magnitude :</b> Seberapa luas pengaruh suatu berita tersebut terhadap khalayak pembaca.</p> <p><b>Prominence :</b> Menyangkut keterkenalan tokoh (name makes news) atau tentang tempat/sesuatu yang dikenal luas (familiar subjects) akan memiliki daya tarik bagi khalayak pembaca.</p> <p>Contohnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI.</li> <li>2) KH Ma'ruf sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).</li> </ol>
		Relevansi	Nilai Berita	<p><b>Timeliness :</b> Fakta yang baru terjadi atau diungkap. Atau sesuatu yang terkait dengan kesegaran peristiwa / kebaruan yang dilaporkan. Semakin baru peristiwa yang dilaporkan, tentu akan memiliki penilaian yang lebih menarik pula.</p> <p>Contohnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menggelar Piala Rusun Festival 2016.</li> </ol> <p><b>Proximity :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Geografis adalah fakta kejadian yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal mayoritas khalayak pembaca.</li> </ol> <p>Contohnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pemberitaan yang menyangkut Pilkada DKI Jakarta akan memiliki nilai berita di bagi pembaca di</li> </ol>

				<p>wilayah DKI Jakarta.</p> <p>2) Psikologis adalah kedekatan subjek yang ada dalam fakta. Ditentukan oleh tingkat keterikatan pikiran, perasaan atau kejiwaan seseorang dengan suatu objek peristiwa atau berita.</p> <p>Contohnya:</p> <p>a) Pemberitaan mengenai kasus penistaan Agama Islam. Yang dimana hal ini menyangkut kepercayaan setiap orang.</p>
2	Impartialitas	Netralitas	Tidak ada pencampuran fakta dan opini	<p><b>Tidak ada percampuran fakta &amp; opini :</b>          Dalam penulisan berita tidak ada pencampuran pandangan pribadi terhadap berita yang di tulis serta selaras dengan kenyataan dan bebas dari prasangka.</p>
			Kesesuaian judul dengan isi	<p><b>Judul &amp; isi sesuai :</b>          Adanya kesesuaian substansi judul berita dengan isi/tubuh berita.</p>
			Tidak ada dramatisasi	<p><b>Tidak ada dramatisasi :</b>          Fakta yang di sajikan dalam takaran proposional sehingga tidak memunculkan kesan berlebihan (menimbulkan kesan ngeri, kesal, jengkel, senang, simpati, antipati dan sejenisnya). Dramatisasi dapat dilihat dari penggunaan kalimat-kalimat yang mengandung majas hiperbola maupun dengan menceritakan detail peristiwa, tetapi tidak relevan.</p>
		Keseimbangan	Cover both Sides (Keterangan dua sisi)	<p><b>Cover both sides :</b>          Menyajikan dua atau lebih gagasan atau tokoh atau pihak-pihak yang berlawanan secara bersamaan dan proporsional. Apakah dalam penyajian berita masing-masing pihak yang diberitakan diberi porsi yang sama sebagai sumber beritanya. Dalam arti tak memihak pada kepentingan-kepentingan tertentu.</p> <p>Contohnya :</p> <p>1) Jaksa dinilai sudah cukup menunjukkan profesionalismenya. Namun, dia mengingatkan supaya jangan sampai ada intervensi. Mahendradatta (Ketua Dewan Pembina TPM) justru mengkhawatirkan jenis hukuman yang</p>

				<p>nanti akan di terima Ahok hanya hukuman Percobaan.</p> <p>Di lain pihak, Ketua Tim Penasihat Hukum Ahok, Trimoelja Soerjadi, merasa keberatan dengan proses sidang kasus dugaan penistaan agama. Menurutnya, persidangan itu terlalu cepat dan di paksakan. Ia menilai, sidang Ahok terjadi lantaran adanya desakan masyarakat lantaran memanasnya kondisi politik.</p>
			Even-handed Evaluation	<p><b>Penilaian sisi positif - negatif seimbang :</b> Menyajikan evaluasi dua sisi (aspek Positif dan negatif) terhadap fakta maupun pihak-pihak secara bersamaan dan proporsional.</p>

Jakarta, 16 Juli 2017

Kepada Yth.  
Bapak Arifin S.Harahap, M.Si  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka melakukan penulisan ilmiah (SKRIPSI) ini, sebagai salah satu persyaratan untuk kelulusan, maka saya:

Nama : Deasy Nurul Sagita

NIM : 2013-52-198

Jurusan : Hubungan Masyarakat

Memohon kepada Bapak/Ibu untuk bersedia menjadi penguji yang bertujuan menguji kategori yang telah penulis sediakan, agar katagori tersebut layak di jadikan penelitian.

Adapun judul penelitian ini ***“Objektifitas Pemberitaan Ahok Pasca Penetapan Sebagai Tersangka Kasus Penistaan Agama Di Surat Kabar Republika.”***

**Unit analisis pada penelitian ini adalah :**

1. Kebenaran → Per naskah berita
2. Relevansi → Per naskah berita
3. Keseimbangan → Per naskah berita
4. Netralitas → Per naskah berita

Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya,

Deasy Nurul Sagita  
**(Peneliti)**

Jakarta, 16 Juli 2017

Kepada Yth.  
Bapak Ahmad Reza, S.Sos, M.Ikom  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka melakukan penulisan ilmiah (SKRIPSI) ini, sebagai salah satu persyaratan untuk kelulusan, maka saya:

Nama : Deasy Nurul Sagita

NIM : 2013-52-198

Jurusan : Hubungan Masyarakat

Memohon kepada Bapak/Ibu untuk bersedia menjadi penguji yang bertujuan menguji kategori yang telah penulis sediakan, agar katagori tersebut layak di jadikan penelitian.

Adapun judul penelitian ini ***“Objektifitas Pemberitaan Ahok Pasca Penetapan Sebagai Tersangka Kasus Penistaan Agama Di Surat Kabar Republika.”***

**Unit analisis pada penelitian ini adalah :**

1. Kebenaran → Per naskah berita
2. Relevansi → Per naskah berita
3. Keseimbangan → Per naskah berita
4. Netralitas → Per naskah berita

Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya,

Deasy Nurul Sagita  
(Peneliti)



Jakarta, 16 Juli 2017

Kepada Yth.  
Bapak Abdurrahman Jemat, M.S  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka melakukan penulisan ilmiah (SKRIPSI) ini, sebagai salah satu persyaratan untuk kelulusan, maka saya:

Nama : Deasy Nurul Sagita

NIM : 2013-52-198

Jurusan : Hubungan Masyarakat

Memohon kepada Bapak/Ibu untuk bersedia menjadi penguji yang bertujuan menguji kategori yang telah penulis sediakan, agar katagori tersebut layak di jadikan penelitian.

Adapun judul penelitian ini ***“Objektifitas Pemberitaan Ahok Pasca Penetapan Sebagai Tersangka Kasus Penistaan Agama Di Surat Kabar Republika.”***

**Unit analisis pada penelitian ini adalah :**

1. Kebenaran → Per naskah berita
2. Relevansi → Per naskah berita
3. Keseimbangan → Per naskah berita
4. Netralitas → Per naskah berita

Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya,

Deasy Nurul Sagita  
(Peneliti)

### Definisi Kategorisasi Objektivitas

No	Dimensi	Kategori	Indikator	Operasional
1	Keakuratan	Kebenaran	Fakta	<p><b>Fakta Sosiologis :</b> Peristiwa yang bahannya berupa peristiwa/kejadian nyata/faktual yang di peroleh dan laporan.</p> <p>Contoh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin beserta jajaran mengadakan silaturahmi dengan Kalpor Jenderal Polisi Tito Karnavian di kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (15/11).</li> </ol>
			Akresi	<p><b>Fakta Psikologis :</b> Berita yang bahannya berupa interpretasi subjektif (pernyataan/opini) terhadap fakta kejadian/gagasan. Apakah berita yang disajikan hanya berisi komentar atau opini seseorang tentang suatu fakta atau peristiwa.</p> <p>Contohnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Pernikahan cukup kompetitif. Tentu saja, kandidat yang berhasil merebut swing voters kami anggap angkanya cukup besar, mereka yang akan berjaya," ujar Direktur Eksekutif dan Riset Poltracking Indonesia Hanta Yuda saat merilis hasil survei terbaru Pilkada DKI Jakarta 2017 di Jakarta, Ahad (17/11).</li> </ol>
				<p><b>Dapat Dilakukan Cek &amp; Recheck :</b> Akurasi itu meliputi ketepatan mengutip sumber berita maupun data dan fakta, yang dimana sumber berita tersebut jelas dan adanya data-data yang mendukung. Hal ini diperlukan agar pembaca memperoleh gambaran dari mana informasi didapat dan apa bisa dipercaya atau tidak. Serta digunakan check and recheck dengan mengkonfirmasi/menguji kebenaran dan ketepatan fakta kepada subjek, orang, atau saksi berita sebelum disajikan.</p> <p>Contohnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberitaan mengenai proses hukum Ahok yang di sampaikan oleh Kalpor Jenderal Tito Karnavian.</li> <li>2) Pemberitaan klarifikasi siapa Ahok yang disampaikan oleh Ketua Tim</li> </ol>

Penasihat Hukum Ahok, Trimolija Soerjadi.

**Significance :**

Adalah seberapa penting fakta yang disampaikan dapat mempengaruhi kehidupan orang dan berakibat terhadap kehidupan khlayak pembaca.

**Magnitude :**

Seberapa luas pengaruh suatu berita tersebut terhadap khlayak pembaca.

**Prominence :**

Menyangkut keterkenalan tokoh (name makes news) atau tentang tempat/sesuatu yang dikenali luas (familiar subjects) akan memiliki daya tarik bagi khlayak pembaca.

**Contohnya :**

- 1) Susuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI.
- 2) KH Ma'rif sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

**Timeliness :**

Fakta yang baru terjadi atau diungkap. Atau sesuatu yang terkait dengan kesegaran peristiwa / kejadian yang dilaporkan. Semakin baru peristiwa yang dilaporkan, tentu akan memiliki penilaian yang lebih menarik pula.

**Contohnya :**

- 1) Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menggelar Piala Rukun Festival 2016.

**Proximity :**

- 1) Geografis adalah fakta kejadian yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal mayoritas khlayak pembaca.

**Contohnya :**

- 1) Pemberitaan yang menyangkut Pilkada DKI Jakarta tentu memiliki nilai berita di bagi pembaca di wilayah DKI Jakarta.
- 2) Psikologis adalah kedekatan subjek yang ada dalam fakta. Dibentukan oleh tingkat keterkaitan pikiran, perasaan atau keinginan seseorang dengan suatu objek peristiwa atau berita.

**Contohnya :**

Relevansi

Nilai Berita



Universitas

Esa Unggul

Even-handed  
evaluation

Penilaian sisi positif - negatif seimbang :  
Menyajikan evaluasi dua sisi (aspek  
positif dan negatif) terhadap fakta maupun  
pihak pihak secara bersamaan dan  
proporsional.



A. Ahmad 19-06-2008 Indonesia, 5.03.11 (Rom)

Universitas

Esa Unggul

Universitas

Esa U

Universitas

Esa Unggul

Universitas

Esa U

## LEMBAR KODING

Judul Penelitian:

Objektivitas Pemberitaan Ahok Pasca Penetapan Sebagai Tersangka Kasus Penistanaan Agama  
Di Surat Kabar Republika

Petunjuk Pengisian:

Berilah tanda checklist / centring (✓), apabila setuju (menerapkan unsur objektivitas) dan  
berilah tanda silang (x) apabila tidak setuju (tidak menerapkan unsur objektivitas), sesuai  
dengan kategori dan definisi kategori yang telah ditentukan.

N=9

No	Kategori	Sampel								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kebenaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Relevansi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Netralitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Keseimbangan	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓

Unit analisis pada penelitian ini adalah permasalahan berita

Jakarta, Juli 2017  
Mengetahui Koder

*[Handwritten Signature]*  
Muhammad Fauzan



## LEMBAR KODING

Judul Penelitian :

Objektivitas Pemberitaan Ahok Pasca Penetapan Sebagai Tersangka Kasus Penistaan Agama  
Di Surat Kabar Republika

Petunjuk Pengisian :

Berilah tanda checklist / centang (✓), apabila setuju (menerapkan unsur objektivitas) dan  
berilah tanda silang (×) apabila tidak setuju (tidak menerapkan unsur objektivitas), sesuai  
dengan kategori dan definisi kategori yang telah ditentukan.

N=9

No	Kategori	Sampel								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kebenaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Relevansi	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓
3	Netralitas	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓
4	Keseimbangan	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓

Unit analisis pada penelitian ini adalah pernakabik berita

Jakarta, Juli 2017  
Mengetahui Koder

  
(R. M. Rizki Iqbal)  
(S. Sos. M. I Kom)

## LEMBAR KODING

### Judul Penelitian:

Objektivitas Pemberitaan Ahok Pasca Penetapan Sebagai Tersangka Kasus Penistaan Agama  
Di Surat Kabar Republik

### Petunjuk Pengisian:

Berilah tanda checklist / centang (✓), apabila setuju (menerapkan unsur objektivitas) dan  
berilah tanda silang (×) apabila tidak setuju (tidak menerapkan unsur objektivitas), sesuai  
dengan kategori dan definisi kategori yang telah ditentukan.

N=9

No	Kategori	Sampel								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kebenaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Relevansi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Netralitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Keseimbangan	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓

Unit analisis pada penelitian ini adalah permaskah berita

Jakarta, Juli 2017  
Mengenalui Koder



# MUI Dukung Upaya Polri

● FUJI EKA PERMANA,  
OOMMARRIA ROSTANTI

**Jaksa Agung berjanji akan serius memindaki lanjutan berkas perkara kasus ini.**

JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin beserta jajaran mengadakan silaturahmi dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (18/11).

Dalam pertemuan itu, Ma'ruf menyatakan, MUI mendukung penuh langkah-langkah Polri dalam memproses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Ma'ruf, Kapolri telah memberikan penjelasan secara tuntas kepada MUI. "Apa yang disampaikan Kapolri itu bisa dipahami oleh pengurus MUI," ujar ketua Rais Aam Syuriah PENU itu.

Meski Basuki telah ditetapkan sebagai tersangka, kata Ma'ruf, MUI akan terus mengawal kasus ini hingga selesai. "Karena itu, kami minta kepada saudara-saudara kami dari agama yang lain supaya masalah ini ditikapi secara proporsional," ungkapnya.

Menurut dia, kasus Ahok jangan sampai menghadirkan perselisihan

antaragama. Sebab, hal tersebut di khawatirkan menimbulkan konflik horizontal.

Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis menilai, proses hukum kasus Ahok telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Tetapi, kata dia, MUI akan terus memantau dan mengawal proses hukum tersebut.

"Kasus ini murni soal hukum, bukan karena masalah pilkada, bukan masalah etnis atau karena beda agama. Ini murni soal dugaan penistaan agama yang murni masalah hukum," kata Cholil menegaskan. Untuk itu, MUI mengajak masyarakat memercayakan kasus itu pada proses hukum.

"Berilah kesempatan kepada kepolisian untuk bekerja menyelesaikan penyidikan secara profesional," MUI sudah menyelesaikan pekerjaannya, yakni memberi penjelasan pendapat dan sikap keagamaan hukum Islam berkenaan dengan dugaan penistaan agama untuk menjawab dari permintaan fatwa.

Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai majelis agama Islam di Indonesia. MUI telah menyerahkan masalah ini kepada proses hukum yang sedang berlangsung. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, kasus hukum Ahok jangan dibawa-bawa ke dalam isu SARA. Sebab, kasus tersebut sejak awal hanya perihal ujaran Ahok saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

"Persoalan hukum ini hanya kebetulan yang bersangkutan memiliki latar belakang agama dan etnis yang spesifik. Tapi, ini jangan sampai dibawa ke isu masalah SARA, apalagi dibawa ke isu kemajemukan dan perpecahan. Ini persoalan hukum, jadi kembalikan ke hukum," kata Tito. Sebab, siapa pun bisa melakukan penistaan agama, bukan hanya Ahok.

Oleh karena itu, Tito meminta masyarakat untuk cerdas dalam memahami isu tersebut. "Kita ikuti saja proses hukumnya. Jangan terbawa emosi untuk dibawa ke masalah-masalah perbedaan suku, latar belakang agama, ras, dan lain-lain," ujar dia.

Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama pada Rabu (18/11). Penetapan itu dilakukan selepas Badan Reserse Kriminal Polri melaksanakan gelar persidangan terbuka terbatas sehari sebelumnya.

Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 69 saksi fakta dan ahli. Para saksi tersebut akan dipanggil kembali untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP) di Bareskrim Polri. Rencananya Ahok pun akan kembali diperiksa sebagai terduga pada Selasa (22/11) pekan depan.

## Serius

Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, Kejaksaan Agung serius dalam

menindaklanjuti perihal berkas perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Bahkan, Prasetyo telah menunjuk jaksa peneliti yang akan mendalami berkas perkara tersebut.

"Bahkan, nanti ketuanya Direktur Orang dan Harta Benda (Oharda) Pak Ali Mukartono. Saya *udh* tunjuk itu," ujarnya. Menurut Prasetyo, Kejaksaan tidak akan main-main dalam memproses kasus tersebut. Jaksa Agung berharap agar kasus itu segera diselesaikan dan dibawa ke meja hijau.

Prasetyo juga mengungkapkan, pada Kamis (17/11) Wakapolri Komjen Syafruddin dan Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono menyambangi Kejaksaan. Kedatangan mereka membahas perihal kasus Ahok. Polri juga memberitahukan kelengkapan semua saksi dan saksi ahli dalam mengusut perkara tersebut. "Dan ketika dinyatakan Ahok tersangka, kita tunggu berkasnya seperti apa."

Selain itu, Prasetyo juga menyatakan, Kejaksaan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Polri. "Kita harapkan di sini pun jangan berlama-lama *lah*. Asumsinya tadi penyidikan sudah akan sempurna karena semua sudah dilakukan oleh penyidik. Tentunya kita berharap akan meringankan tugas kita dalam penelitian berkas perkaranya nanti untuk segera bisa kita limpahkan ke pengadilan. Biar hakim yang memutuskan," katanya.

■ mabrurroh.edi.muhammad.iqbal



Sampel 2

Sabtu, 19 November 2016

Judul : Aksi Bela Islam III Digelar 2 Desember

# Aksi Bela Islam III Digelar 2 Desember

● EKO SUPRIYADI,  
HALIMATUS SA'DIYAH

**Wiranto meminta aksi jangan mengganggu eksistensi negara.**

JAKARTA — Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) sepakat untuk kembali menggelar Aksi Bela Islam. Setelah sebelumnya digelar pada 14 Oktober dan 4 November, GNPF merencanakan aksi pada 2 Desember 2016.

Ketua Umum Front Pembela Islam Habib Rizieq menjelaskan, Aksi Bela Islam III dilakukan karena tersangka kasus dugaan penistaan agama, yaitu gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak ditahan oleh Mabes Polri. Ia menjelaskan, pemilihan waktu 2 Desember lantaran bertepatan dengan Jumat kubro dan Maulid akbar.

"Bentuk aksinya adalah aksi ibadah gelar sajadah. Bukan hanya sekadar damai, tapi super damai," kata Rizieq di Jakarta, Jumat (18/11). Menurut dia, aksi tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kedamaian dan berjalan di atas koridor konstitusi.

Adapun kegiatan-kegiatannya adalah shalat Jumat berjamaah di Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin dengan posisi imam di Bundaran HI. Setelah itu, dilaksanakan istighatsah, berzikir, dan berdoa untuk keselamatan negeri.

Rizieq pun berharap agar polisi menegakkan hukum kepada penista agama dan pelindung-pelindungnya. "Kami mengajak masyarakat lintas mazhab dan aliran, budaya, agama, untuk ikut mendukung. Begitupun pemilik gedung (di Jalan Sudirman dan Thamrin) untuk memberikan dukungan kepada masyarakat," ujarnya.

kat," ujarnya.

Aksi ini diperkirakan diikuti oleh 67 ormas. Sementara, jumlah peserta aksi belum bisa diprediksi.

"Jumlah peserta aksi tergantung kepuasan publik, semakin tersakiti, semakin banyak pesertanya," kata Rizieq. Juru bicara FPI Munarman menambahkan, GNPF MUI kecewa dan marah kepada Ahok yang dinilai telah memecah belah bangsa.

Menurut dia, jika tidak ditahan, Ahok berpotensi melarikan diri, walaupun sudah dicekal Mabes Polri. Selain itu, gubernur DKI nonaktif tersebut berpotensi menghilangkan barang bukti lainnya, termasuk rekaman resmi yang ada di Pemprov DKI Jakarta.

**Bukan hanya sekadar damai, tapi super damai**

"Ini sebuah ketidakadilan dan ketidakadilan warga negara di muka hukum serta menjadi preseden buruk bagi hukum," ujar Munarman. Pemerintah menghargai niatan GNPF MUI yang akan menggelar Aksi Bela Islam III.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi demo yang mengganggu eksistensi negara.

"Harus kita pisahkan betul antara demonstrasi yang betul-betul demonstrasi, menuntut keadilan, dengan demonstrasi yang punya arah lain, mengganggu ketenangan, ketertiban, dan eksistensi negara," ujarnya.

Namun, Wiranto enggan menjelaskan secara gamblang apa yang ia maksud dengan 'demonstrasi yang punya arah lain.' Mantan ketua umum Partai Hanura

tersebut hanya mengatakan, jangan sampai sejarah masa lalu terulang saat bangsa Indonesia terpecah belah.

Wiranto berpendapat, harusnya tak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk kembali turun ke jalan. Sebab, tuntutan mereka saat Aksi Bela Islam II telah dipenuhi. Oleh karena itu, Wiranto mempertanyakan apa tujuan demo lanjutan yang akan digelar pada 2 Desember.

Pemerintah, kata dia, menghargai hak tiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun, Wiranto mengingatkan, setiap aksi demonstrasi juga harus jelas tujuannya dan memiliki izin dari aparat keamanan.

Jika demo berpotensi mengganggu keamanan negara, kata dia, maka aparat keamanan berhak membubarkan massa.

"Jangan sampai kebebasan menyuarakan pendapat melalui demonstrasi itu mengganggu ketertiban umum, mengganggu eksistensi negara. Kalau itu dilaksanakan, berarti memang harus ada langkah yang tegas dan keras," kata Wiranto.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai, tidak perlu lagi ada aksi unjuk rasa bila tujuannya untuk menentukan kasus hukum Ahok. Sebab, Tito menjamin kasus penistaan agama itu akan dibawa ke Kejaksaan Agung RI.

"Sebagai Kapolri, kalau percaya (pada polisi) maka tidak perlu ada demo. Ikuti saja proses hukum yang berjalan," ujarnya. Tito menjelaskan bahwa dalam menangani kasus penistaan agama, Polri bersikap profesional.

Ahok pun sudah ditetapkan menjadi tersangka pada Rabu (16/11) lalu pascagelar perkara yang digelar sehari sebelumnya. Namun, apabila memang masyarakat masih memaksakan diri untuk melakukan aksi pada 2 Desember 2016, mantan kepala BNPT ini mengimbau agar massa yang ikut dibatasi.

■ mabrurroh ed: muhammad iqbal



Sampel 3

Minggu, 20 November 2016

Judul : Kampanye Jangan Lagi Ditolak

# Kampanye Jangan Lagi Ditolak

• DIAN ERIKA N, FAUZIAH MURSID

**Kunci antisipasi  
penolakan kampanye  
adalah penegakan hukum.**

JAKARTA — Penolakan kampanye terhadap pasangan calon (paslon) gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Syaiful Hidayat berpotensi menghambat proses demokrasi.

"Ini menjadi kekhawatiran kami. Jangan sampai semua saling menghalangi," kata Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, di Jakarta, Sabtu (19/11).

Jufri mengatakan, Bawaslu DKI akan menindak tegas setiap penolakan kampanye sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Penindakan harus berdasarkan pembuktian dan sesuai undang-undang (UU).

"Bahaya juga kalau semena-mena. Jika terbukti, ya ditindak sebagaimana aturan UU," kata Jufri.

Belum bisa diketahui pasti, kata dia, pihak mana yang bertanggung jawab atas aksi penolakan tersebut. Pengembangan kasus penolakan sudah dilimpahkan sepenuhnya kepada kepolisian.

Pengembangan kasus atau tidak itu menjadi kewenangan pihak berwajib. "Penyidikan sudah dilakukan," ujarnya.

Namun, menurut Jufri, merujuk kepada hasil klarifikasi sementara baik lewat saksi atau bukti, pelaku belum mengarah kepada salah satu paslon. Latar belakangnya pun bukan berasal dari tim sukses (timses) mana pun.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menilai, aksi penolakan itu merupakan salah satu potensi gangguan tahapan Pilkada DKI Jakarta. Tanpa penindakan tegas, penolakan berpotensi mengganggu tahapan pilkada selanjutnya.

Fadli menjelaskan, pilkada ini menyisakan banyak tahapan, seperti distribusi logistik, pendaftaran pemilih, pembagian surat panggilan C6, dan penghitungan suara. "Proses-proses tersebut bisa saja

diganggu," ujarnya.

"Kuncinya adalah penegakan hukum yang tegas," katanya. Penegakan hukum, kata dia, diharapkan memberi efek jera kepada pelaku. Ini dianggap penting untuk menghindari insiden dalam pilkada.

Menurut dia, jika penolakan dibiarkan, akan ada potensi berulang dan menyebar. Apalagi, jika penolakan meluas ke wilayah lain. Misalnya, Banten dan Aceh.

Antisipasi penolakan itu, menurut Fadli, tidak bisa dibebankan hanya kepada KPU dan Bawaslu. Masing-masing pihak paslon harus memegang komitmen bersama melaksanakan proses kampanye yang damai, tertib, dan saling berkoordinasi, sehingga tidak ada saling menolak oleh beberapa pihak.

Sebelumnya, aksi penolakan kampanye pasangan nomor urut dua tersebut marak terjadi. Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) dan Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB) mencatat, selama kampanye Pilkada DKI mulai 28 Oktober 2016, sudah ada empat kali gangguan dan intimidasi. Di antaranya, saat Ahok berkampanye di Jagakarsa pada 31 Oktober 2016 dan di Rawabelong pada 2 November 2016.

Insiden yang sama juga terjadi saat Djarot kampanye di Cilincing, Jakarta Utara, pada 2 November 2016 dan di Kebayoran Lama pada 6 November lalu.

Bentuk gangguan itu tidak hanya berupa pengadangan, protes, dan ujaran kebencian bernada SARA, bahkan ada yang cenderung mengancam keselamatan kandidat.

## **Komunikasi**

Timses dan relawan Ahokers, Ivan Hoe Semen, mengatakan, tentunya kasus dugaan penistaan menjadi pelajaran Ahok dan timses dalam berkomunikasi.

Timses telah menyarankan Ahok mengendalikan pernyataannya kepada publik. "Saat ini juga Pak Ahok sudah berusaha memperbaiki pola komunikasinya," kata Ivan. Namun, dia mengakui, pernyataan yang dilontarkan Ahok berada dalam konteks yang tidak tepat.

Dia juga meyakini, tidak ada maksud Ahok menyakiti masyarakat Ibu Kota. "Saya yakin, dalam hati Pak Ahok tidak ada niatan seperti itu." ■ ed: nashih nashrullah



# Swing Voter Menentukan

● ALI MANSUR

## Pemilih DKI cenderung dinamis.

JAKARTA — Pemilih mengambang (*swing voter*) dinilai menjadi penentu pada persaingan Pilkada DKI Jakarta 2017. Hasil survei menunjukkan, elektabilitas ketiga pasangan calon (paslon) bersaing ketat.

"Persaingan cukup kompetitif. Tentu saja, kandidat yang berhasil merebut *swing voters* kami anggap akan berjaya," ujar Direktur Eksekutif dan Riset Poltracking Indonesia Hanta Yuda saat merilis hasil survei terbaru Pilkada DKI Jakarta 2017 di Jakarta, Ahad (27/11).

Berdasarkan hasil survei Poltracking, pasangan nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, meraih angka 27,92 persen. Kemudian, disusul Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot mendapatkan 22,00 persen. Sedangkan, pasangan nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memperoleh 20,42 persen. Sementara, untuk pemilih yang belum menentukan (*swing voter*) sebesar 29,66 persen.

Angka itu didapat setelah Poltracking Indonesia melakukan survei dari 7-17 November 2016 dengan menggunakan metode *stage random sampling*. Survei tersebut diikuti 1.200 responden dengan *margin of error* sebesar kurang lebih 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Khusus Ahok-Djarot, lanjut Hanta, selain elektabilitasnya menurun

drastis, hasil survei juga menunjukkan, pasangan ini tak berdaya saat *head to head* antara ketiga pasang-an. Ahok-Djarot selalu kalah saat disimulasikan Pilkada DKI Jakarta hanya diikuti oleh dua pasangan calon saja, baik dihadapkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni maupun Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Sementara, pasangan Agus-Sylvi selalu unggul ketika dihadapkan dengan pasangan siapa saja.

Agus-Sylvi unggul telak dengan perolehan 45,95 persen saat berhadapan dengan Ahok-Djarot yang hanya mendapatkan 24,83 poin dengan *undecided voters* sebesar 29,25 persen. Kemudian, Agus-Sylvi juga unggul tipis atas Anies-Sandi dengan angka 37,75 persen berbanding 28,08 persen. Sementara, untuk *undecided voters*-nya sebanyak 34,17 persen.

Untuk pasangan nomor urut tiga, Anies-Sandi, lebih unggul dengan 39,92 persen dari pasangan Ahok-Djarot 25,75 persen dan pilihannya yang belum menentukan Hasil ini berbanding terbalik pada saat hasil survei Poltracking Indonesia pada September lalu. Ketika itu, Ahok-Djarot berhasil unggul dengan 37,95 persen dan Anies-Sandi 36,38 persen.

Namun, menurut Hanta, angka ini akan terus berubah dalam beberapa waktu ke depan. Mengingat, pemilih di DKI Jakarta cenderung dinamis dibanding daerah lainnya.

### SWING VOTER BULAN NOVEMBER

Survei Versi	Prosentase
Indikator Politik Poltracking Indonesia	24%
Lingkaran Survei Indonesia CSIS	29,6%
	34,4%
	25%

Sumber: Pusat Data Republik

Bahkan, angka *undecided voters* lebih tinggi dibanding presentasi ketiga pasangan calon tersebut, yaitu mencapai 29,66 persen.

Menanggapi hal tersebut, anggota tim pemenangan Ahok-Djarot Ansy Lema menegaskan, pihaknya tidak khawatir, apalagi panik dengan hasil survei Poltracking Indonesia terbaru ini. Pihaknya juga mengakui apabila elektabilitas jagoannya merosot. Hanya saja, kata Ansy, itu terjadi

karena situasi politik yang tengah pada titik mendingi. Apalagi, survei itu dilakukan beberapa hari pasca-pemilihan umum, yang tentunya menyurutkan Ahok.

"Saya kira, hasil survei ini terpengaruh oleh aksi 411. Tapi, ingat, masih banyak waktu untuk mengevaluasi. Kasus Ahok juga belum final, tersangka itu belum tentu terdakwa," tu-

turnya. Sedangkan, tim pemenangan Agus-Sylvi mengaku, hasil survei tersebut menjadi tantangan. "Karena, kami mulai dari nol dan kini memimpin. Tapi, ini masih tiga bulan lagi, semoga tabungan ini tetap terjaga dan terus bertambah," ungkap anggota tim pemenangan Agus-Sylvi, Didi Irawadi Syamsudin.

■ **edi:** muhammad haflil



Sampel 5

Selasa, 06 Desember 2016

Judul : Ahok Tingkatkan Kepercayaan Diri Anak Rusun

## Ahok Tingkatkan Kepercayaan Diri Anak Rusun

JAKARTA — Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, kepercayaan diri anak-anak penghuni rumah susun (rusun) harus terus ditingkatkan. "Makanya saya pernah kirim salah satu tim sepak bola anak-anak rusun berkunjung ke Valencia FC di

Spanyol," kata Ahok, di Rumah Lembang, Menteng, Senin (5/12).

Ahok mengaku belum pernah pergi ke Spanyol apalagi sampai menonton pertandingan klub Valencia FC secara langsung. "Makanya, saya mau kasih kesempatan ini, jadi anak-anak rusun bisa merasakan," ujar Ahok.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Piala Rusun Festival 2016. Dalam kejuaraan itu, anak-anak dari Rusun Daan Mogot menjadi pemenang dan

diterbangkan ke Madrid dan Valencia untuk mengikuti pelatihan sepak bola.

Selain menggelar kejuaraan, Ahok punya cara lain meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan memberikan berbagai fasilitas untuk menunjang pendidikan anak-anak rusun.

"Untuk anak-anak rusun itu kami sudah kasih Kartu Jakarta Pintar, naik bus Transjakarta gratis, kursus gratis, dan lain-lain," ungkap Ahok.

■ antara ed: erik purnama putra



# Sidang Perdana Kasus Ahok 13 Desember

• AHMAD ISLAMU JAMIL,  
DIAN FATH RISALAH

**Polri menyiapkan pengamanan maksimal sidang Ahok.**

JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menetapkan jadwal sidang perdana perkara pidana penistaan agama yang meniliri Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahjaja Purnama alias Ahok. Menurut rencana, sidang pembuka tersebut bakal digelar pada 13 Desember ini.

"Menurut jadwal (sidang perdana kasus Ahok) Selasa, 13 Desember 2016, pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Kusuma Atmadja PN Jakarta Utara," ujar Humas PN Jakarta Utara, Hasololo Sianturi, kepada wartawan, Senin (5/12).

Dia mengatakan, instansinya juga telah menetapkan susunan majelis hakim yang akan menangani perkara dugaan penistaan agama oleh Ahok. Menurut rencana, proses persidangan nanti akan dipimpin langsung oleh ketua PN Jakarta Utara, yaitu hakim Dwiarto Budi Setianto. Sementara, empat hakim anggota yang akan mendampingi Dwiarto adalah Supriyadi, Abdul Rozak, Joseph Rahantoknam, dan I Wayan Wijana.

Hasololo menampilkan jika pengerahan lima hakim dalam persi-

dangan Ahok tersebut sebagai bentuk perlakuan istimewa instansinya terhadap mantan bupati Belitung itu. Menurut dia, jumlah hakim yang mengadili suatu perkara sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan, bukan atas masukan dari pihak-pihak lain.

"Dalam berbagai perkara memang biasanya tiga atau lima hakim. Yang penting jumlahnya harus ganjil, biar jika dilakukan voting tidak ada *deadlock*," ujarnya menjelaskan.

Mengenai teknis pengamanan sidang Ahok nantinya, Hasololo mengatakan, PN Jakarta Utara akan berkoordinasi dengan lembaga kejaksaan dan kepolisian. Dia pun memastikan proses peradilan tersebut bakal dilakukan secara terbuka dan transparan. "Karena hukum acara memang mengharuskan persidangan terbuka untuk umum," ujarnya.

Ahok kembali mengungkapkan keinginannya agar sidang kasus dugaan penistaan agama yang menjeratnya dapat disiarakan langsung. Ia pun ingin jalannya sidang nanti tidak kalah dengan sidang kasus sianida.

"Mudah-mudahan sidangnya cepet. Saya pikir harus cepet. Stasiun TV juga jangan cuma Jessica yang diliput lama. Saya sidang mesti diliput. Supaya orang tahu ada *nggak* niat saya menghina dan menista agama," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/12).

Mantan bupati Belitung Timur itu menegaskan, dirinya tidak pernah memiliki niat untuk menistakan aga-

ma apa pun karena ia memercayai berbagai kitab suci serta meladani sifat dari Nabi Muhammad SAW. "Saya percaya kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Alquran. Saya percaya ada akhirat dan saya percaya Nabi Muhammad. Ajaran beliau memiliki sifat amanah, sidik, fathanah, dan tabligh," ujar Ahok.

Kapalri Jenderal Pol Tito Karnavian saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengatakan, pengamanan maksimal perlu dilakukan pada sidang kasus penistaan agama tersebut. Sebab, sidang tersebut akan menjadi magnet pengumpulan massa.

Tito mengatakan, sidang kasus tersebut menjadi klimaks dari aksi menuntut penegakan hukum yang dilakukan oleh jutaan umat Islam di seluruh Indonesia. "Kami sudah mulai menyusun langkah-langkah untuk mengamankan jalannya persidangan karena ini bisa juga jadi magnet pengumpulan massa," jelas Tito di depan anggota Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senin (5/12).

Mantan ketua umum MUI, Din Syamsuddin, mengendus adanya ketidakadilan dalam penyelesaian kasus penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur DKI, Basuki Tjahjaja Purnama atau Ahok. Pasalnya, penyelesaian kasus tersebut berjalan secara tidak lazim seperti kasus-kasus lain.

"Saya melihat ada gelagat ketidakadilan dalam penyelesaian kasus

ini (penistaan agama oleh Ahok). Maka itu, saya minta agar pihak yang berwenang segera menyelesaikannya secara adil," ujar Din saat ditemui usai kuliah umum di Sportarium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (5/12).

Ia menyampaikan, ketidakadilan dalam penyelesaian kasus Ahok bisa memancing reaksi masyarakat yang lebih besar daripada sebelumnya. Sebab, hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan di hati masyarakat yang selama ini menuntut keadilan atas kasus tersebut.

Din mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan kasus penistaan agama ini berlangsung berlarut-larut. "Jangan sampai bangsa ini tersandera akibat ulah satu orang. Hanya gara-gara Ahok kita terpecah belah," kata Din.

Ia juga menyatakan kekecewaan terhadap sebagian kalangan yang mencoba membelokkan nalar masyarakat. Antara lain menyebut-nyebut kelompok umat Islam yang melakukan aksi damai sebagai ancaman bagi kesatuan negara.

Din menyebut umat Islam sangat memegang teguh nilai-nilai kebinekaan. Bukhinya, ujar dia, Aksi Bela Alquran berjalan dengan tertib dan aman. "Sekarang sudah muncul kecurigaan nalar. Kelompok umat Islam yang aksi damai dituduh anti-kebinekaan. Saya rasa, justru yang anti-kebinekaan adalah yang menuduh umat Islam demikian," kata Din.

■ Rizma Riyandi/edi; haridz multiasary



# Jaksa Dinilai Profesional

• QOMMARRIA ROSTANTI,  
DIAN FATH RISALAH

**Kuasa hukum Ahok  
menilai persidangan  
karena tekanan massa.**

JAKARTA — Tim Pengacara Muslim (TPM) mengapresiasi jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang perdana kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. TPM melihat dakwaan yang dibacakan JPU telah tersampaikan dengan baik.

"Saya punya keyakinan kejaksaan akan mengungkap semua unsur-unsur yang dibutuhkan untuk menahankan Ahok," ujar Ketua Dewan Pembina TPM Muhammad Mahendradatta kepada *Republika*, Selasa (13/12).

JPU, kata dia, berani menempatkan Ahok pada posisi melanggar kedudukan dan aturan. Ahok dinilai melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pas disampaikan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu mengingat saat itu belum memasuki waktu kampanyenya.

Saat itu, Ahok sudah berbicara-

kan permasalahan tentang apakah dia akan terpilih lagi atau tidak sebagai gubernur DKI Jakarta. Mahendradatta melihat, ada niat kesengajaan yang kuat dalam ucapan Ahok. JPU, kata dia, juga sudah berani mengajukan kepada majelis hakim bahwa Ahok melakukan penghinaan bukan hanya pada agama, melainkan kepada ulama dan umat Islam.

Dalam sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (berlokasi di eks PN Jakarta Pusat), Ahok menyebut pernyataan surat al-Maidah ayat 51 ditujukan kepada lawan politiknya. Namun, menurut Mahendradatta, jelas dalam ucapan Ahok tidak ada menyebut lawan politik. "Dia menggeneralisir semuanya. Bisa jadi pertimbangan hakim kalau Ahok bisa membuktikan ada lawan politik yang memaknai itu. Tapi, kalau tidak bisa dibuktikan, tidak akan bernilai," ujarnya.

Jaksa dinilai sudah cukup menunjukkan profesionalismenya. Namun, dia mengingatkan supaya janggan sampai ada intervensi. Mahendradatta justru mengkhawatirkan jenis hukuman yang nanti akan diterima Ahok hanya hukuman percobaan.

Padahal, selama ini tidak ada satu

pun terdakwa penistaan agama yang tidak dihukum penjara. "Harusnya hukum langsung, bukan percobaan. Jangan *bikin* marah umat," ujarnya.

Dia berharap proses persidangan berlangsung cepat dan majelis hakim memberikan vonis sesuai peraturan hukum yang berlaku. Salah satu wewenang hakim, kata dia, adalah menahkannya. "Hakim berhak segera mengeluarkan surat penetapan penahanan," katanya.

Di lain pihak, Ketua Tim Penasihat Hukum Ahok, Trimoejja Soerjadi, merasa keberatan dengan proses sidang kasus dugaan penistaan agama. Menurutnya, persidangan itu terlalu cepat dan dipaksakan.

Ia menilai, sidang Ahok terjadi lantaran adanya desakan masyarakat lantaran memanasnya kondisi politik usai Buni Yani, seorang pengajar di Jakarta, mengunggah video Ahok di Kepulauan Seribu. "Pengadilan ini terjadi karena desakan massa karena ketika video versi *full* di-*upload*, saat itu tidak ada orang yang marah dan tersinggung," kata Tri di hadapan majelis hakim.

Menurutnya, masyarakat mulai terprovokasi saat Buni Yani yang mengunggah video dan memasukkan transkrip perkataan Ahok yang tidak dikutip secara utuh. Sembilan hari

kemudian, setelah mendengar transkrip video yang provokatif oleh Buni Yani, terjadilah protes yang berkembang dan berujung pada aksi demo yang berkelanjutan.

"Marilah kita sebut aksi ini adalah tekanan massa yang mengakibatkan timbulnya proses hukum yang sangat cepat, yang terjadi di luar kebiasaan," ujarnya menambahkan.

Sementara itu, para pelapor Ahok menyampaikan kekecewaan karena tak bisa masuk ruang sidang kemarin. Pelapor tidak bisa masuk karena ruang sidang telah penuh sejak kemarin pagi. "Pertanyaannya siapa mereka yang ada di dalam. Kenapa pelapornya tidak boleh masuk. Tidak ada sama sekali," kata Irena Handono, seorang muallaf mantan biarawati sebagai salah satu pihak pelapor Ahok, di depan gedung pengadilan, kemarin.

Pedri Kasman, sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, juga menyayangkan tidak diperbolehkan masuk ruang sidang meski posisinya sebagai pelapor. "Kami tidak boleh masuk ke ruangan sidang. Kami melihat ada diskriminasi. Seharusnya, pelapor dan terlapor ada di ruang sidang. Kami meminta pengadilan negeri dan Kaprolres bertanggung jawab," katanya. ■ eko supriyadi ed: fitriyan zamzami



# JAKSA: AHOK SENGAJA

• DIAN FATIHSALAH

## Massa kedua kubu nyaris bentrok.

JAKARTA — Persidangan perdana kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (13/12). Dalam sidang tersebut, jaksa mendakwa Ahok sengaja menggunakan surah al-Maidah ayat 51 untuk membujuk warga.

"Bahwa meskipun kunjungan tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta, maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan gubernur DKI dengan mengaitkan surah al-Maidah ayat 51," kata jaksa penuntut umum (JPU) Ali Mukartono dalam persidangan kemarin.

Kunjungan yang dimaksud jaksa adalah kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu pada September lalu. Dalam rekaman pidatonya pada kunjungan itu, Ahok terkeam meminta warga jangan mau "dibohongi" dengan surah al-Maidah ayat 51.

Ali juga menjelaskan, Ahok mengatakan seolah-olah al-Maidah ayat 51 dipergunakan oleh orang lain untuk membahong atau membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Padahal, menurut Ali, justru Ahok yang mengungkit-ungkit penggunaan ayat tersebut dalam pidato.

Tindakan Ahok tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian sebagai tindak penistaan agama. JPU kemudian juga mendakwa Ahok dengan Pasal 156 KUHP tentang Penodaan Agama. hukuman bagi penista agama menurut pasal itu adalah maksimal lima tahun penjara.

Menanggapi cepatnya proses hukum, se usai persidangan Ali menegaskan, berkas perkara Ahok telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga jaksa wajib menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan. Ali juga menegaskan, JPU bekerja profesional dan tidak menerima intervensi dari pihak manapun.

Ia juga menyangkal tuduhan bahwa pemidanaan Ahok merupakan pelanggaran HAM. "Melanggar HAM bagaimana, letaknya di mana, saya juga kurang bisa mengerti. Tapi, dari dakwaan itu, kembali ke perbuatan beliau bahwa hasil penyidikan menyatakan seperti itu (adanya perbuatan pidana)," kata Ali.

Sidang kemarin juga dihadiri

ratusan pengunjung rasa dari kedua kubu. Sejak pagi hari, ratusan massa dari beberapa ormas, seperti Harakah Sunmiah untuk Masyarakat Islam (Hasmi), Satuan Pembela Islam, Majelis Az-Zikra, dan Laskar Pembela Islam terpantau menyugakan barisan di Jalan Gajah Mada, depan PN Jakarta Utara. Mereka mendorong Ahok ditangkap sehubungan kasusnya sudah memasuki persidangan.

Di lain pihak, hadir pula massa pendukung Ahok. Kedua pihak nyaris bentrok saat ada sekelompok orang membentangkan spanduk bertuliskan 'Tangkap dan Adili Ahok' di tengah pendukung Ahok.

Kendati demikian, situasi tersebut berhasil dikendalikan oleh pihak kepolisian, sementara massa dari kedua kubu juga menahan diri. Sebanyak 2.996 personel kepolisian dikerahkan untuk menjaga jalannya persidangan.

Dalam persidangan kemarin, Ahok juga membacakan eksepsinya. Ahok menegaskan, ucapannya tentang surah al-Maidah tidak bertujuan untuk menafsirkan ayat tersebut. Ahok juga mengklaim tidak memiliki niat sedikit pun untuk menistakan atau menghina agama Islam.

Ahok sempat meneteskan air ma-

ta saat bercerita tentang ibu angkatnya, Misribu binti Acca. "Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu, sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri, yang sangat saya sayangi," kata dia.

Meski begitu, Ahok dalam nota pembelaan kemarin kembali menegaskan, al-Maidah ayat 51 kerap digunakan "untuk memecah belah rakyat, dengan tujuan memuluskan jalan merah-puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme".

Ia menuding bahwa ayat tersebut sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elite karena tidak bisa bersaing dengan visi-misi, program, dan integritas pribadinya. "Mereka berusaha berhadapan di balik ayat suci itu, agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya," kata Ahok.

Selepas pembacaan nota keberatan, sidang kemudian ditunda untuk dilanjutkan kembali pekan depan. Agendanya, pembacaan tanggapan jaksa atas nota keberatan Ahok. Selanjutnya, sidang akan membahas keberatan di depan PN Jakarta Utara juga bubar dengan tertib. ■ eko supriyadi/liniar

setrta ed:fitriyan zamzami



**InDepth**  
Professional

Hlm- 9



# Jakarta Seजार Kota Maju

• NOER QOMARIAH K

**Peran perempuan di berbagai sektor menandakan majunya kota.**

**JAKARTA**— Jakarta sebagai ibu kota Indonesia terus berbenah agar bisa setara dengan kota-kota besar maju di dunia. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Kadisikominfo) DKI, Dian Ekowati menganggap, Jakarta saat ini sudah menjadi kota modern dan metropolitan yang memiliki perkembangan teknologi sangat cepat. Masyarakat di Jakarta, terutama anak-anak, menurut dia, dapat dengan mudah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi terbaru.

"Anak-anak kita ini juga dengan tingkat pendidikan mereka sekarang ini sangat cepat untuk mengadopsi kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat ini," ujarnya, Rabu (21/12). Dian mengatakan, Jakarta sudah dapat dikatakan sejajar dengan kota-kota maju lainnya, seperti Singapura. Menurut dia, apa yang ada di kota-kota maju pasti fasilitas itu juga bisa ditemukan di Jakarta. Karena itu, ia berharap, masyarakat bisa ikut serta membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman ditinggali semua orang.

"Tentu saja bisa, kita punya potensi seperti itu, terutama kalau pe-

merintah ini didukung dengan masukan dari masyarakat. Jadi, masyarakat memberikan *feedback* juga ke kita. Sambal berjalannya itu, *feedback* masyarakat selama ini masuk terus ke kita melalui (aplikasi) *Qlue*. Itu bisa semakin mempercepat atau menyempurnakan pembangunan yang dilakukan pemerintah," ujarnya.

Meskipun ada penilaian miring terhadap Jakarta, ia menilai, kondisinya saat ini lebih baik daripada beberapa waktu lalu. Pemprov DKI pun sudah banyak melakukan upaya atau kerja keras yang luar biasa. Karena itu, ia berharap, ke depannya Jakarta bisa semakin bagus.

"Contoh yang paling kasat mata adalah kebersihan sungai. Kebersihan sungai selama beberapa puluh tahun atau beberapa belas tahun akhir ini yang masih sangat kotor saat ini sudah mulai bisa melihat sangat tanpa sampah atau sampahnya tinggal sedikit-sedikit. Kemudian tentang pembangunan infrastruktur itu kita sedang melakukan pembangunan besar-besaran," katanya.

Lurah Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Debby Novita Andriana menyatakan, Jakarta itu ibarat barometer bagi kota lain di Indonesia. Sebab, status Jakarta sebagai ibu kota negara membuatnya selalu menjadi patokan kemajuan Jakarta ini suatu kota yang harus memiliki keunggulan di antara kota-kota yang lain karena barometernya daerah lain. Jadi, Jakarta itu harus punya kekhususan sendiri *lah gitu*,

kata Debby.

Dia menyebut, dari segi fisik lingkungan, Jakarta sudah jauh lebih maju niswawai. Pembangunan Jakarta sudah lebih tertata dan rapi, serta harus tetap berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Begitu juga dari segi ekonominya, menurut Debby, Jakarta sudah lebih baik dengan meningkatnya upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 3,35 juta per bulan.

"Kalau dari segi sumber daya manusianya sekarang sudah jauh lebih baik, ataupun di wilayah lain juga masih kita temukan beberapa masyarakat yang pendidikannya masih di bawah standar. Tapi, itu tidak mengurangi esensi pelayanan kita ke pada masyarakat, yang jelas Jakarta saat ini dari sumber daya manusia, pembangunannya, semuanya sudah lebih baik dari sebelumnya," kata dia.

Debby menyarankan, Jakarta sudah saatnya mengajarkan diri sama dengan ibu kota negara tetangga, seperti Singapura atau Kuala Lumpur. Hal tersebut disebabkan Pemprov DKI sudah merintis pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta dan *light rail transit* (LRT). Dengan segala kekurangannya, ia optimis, Jakarta cepat atau lambat semaju kota-kota besar di negara tetangga.

"Yang jelas, untuk Jakarta sendiri perbaikan untuk sarana transportasi, perhubungannya dalam artian di sisi infrastruktur jalannya yang mungkin kalau kita lihat tiap tahun peningkatan kendaraan pasti ada.

Tapi, harus *dibarengi* juga dengan peningkatan jumlah infrastruktur jalan sehingga bisa mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta, salah satunya itu," ujarnya.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Yuke Yurike mengatakan, peran perempuan yang bisa masuk di semua sektor kehidupan menandakan majunya pencapaian Jakarta. Yuke merasa, sejak Joko Widodo (Jokowi) dan dilanjutkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi gubernur DKI, pembangunan di Ibu Kota terasa dapat dirasakan semua kalangan.

"Ibu-ibu kan urusannya keluarga, anak *gitu* ya terutama dari sisi pelayanan kesehatan. Sudah *gitu* juga di puskesmas sudah terasa, di rumah sakit dengan KJS-nya. Sudah *gitu* untuk sekolah kita juga turun ke bawah. Banyak yang terbantu sekali *kan*, itu sangat meringankan," ujar Yuke.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI, Yuke menuturkan, dapat membuat ibu-ibu berhemat karena pengeluaran bisa ditekan. Hal itu berdampak pada pemasukan keluarga bisa dialokasikan lebih untuk memerhatikan gizi serta makanan anak-anaknya. Yuke mengatakan, Jakarta memiliki banyak anggota pejabat perempuan dan Indonesia pernah memiliki presiden ibu kota negara lain.

"Jadi, menurut kita *siti* sejauh ini kebijakan-kebijakan Pemprov DKI sudah cukup properempuan" kata dia

■ **edi**-erik purnama putra

**4INTERNATIONAL MEDIA & NEWSPAPERS**  
Your Gateway to World Newspapers

**TOP NEWSPAPERS IN INDONESIA**  
by 2016 Newspaper Web Ranking

Asia > Newspapers in Indonesia  
List of top newspapers in Indonesia by web ranking. [Link to it](#)

Rank	Newspaper	Location
1	Kompas	Jakarta
2	The Jakarta Post	Jakarta
3	Republika	Jakarta
4	Koran Tempo	Jakarta
5	Bisnis Indonesia	Jakarta
6	Suara Merdeka	Semarang
7	Pikiran Rakyat	Bandung
8	Serambi	Bandar Aceh

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.  
Ok

### KARTU ABSENSI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Deasy Anwar Sagara  
 Nim : 2013 02 1318  
 Nopol : SR 22 - Raya - 2015  
 e-mail : deasy.anwar@gmail.com  
 Judul/Thema : Obsektifitas Persepsi dan Akademi Persepsi Persepsi Siswa, Anggapan Persepsi Persepsi Agama  
 Pembimbing : Dr. Dan Utarokaryah, M.Pd.

No	Tanggal	Bab	Catatan Pembimbing	TTD Pembimbing
1	5 Juni 2018	4	Submit Bab 4, Disetujui	
2	11 Juni 2018	4	Revisi Bab 4, Disetujui	
3	18 Juni 2018	4	Revisi Persepsi Bab 4, Disetujui	
4	26 Juni 2018	5	Submit Bab 5, Disetujui	
5	29 Juni 2018	5	Revisi Bab 5, Disetujui	
6	8 Juli 2018	5	Revisi Persepsi Bab 5, Disetujui	
7	9 Juli 2018	4-5	Submit Bab 4-5, revisi, Disetujui	
8	13 Juli 2018	4-5	Re-check Bab 4-5	
9	17 Juli 2018	4-5	Revisi Bab 4-5, Disetujui	
10	24 Juli 2018	1-5	Acc Skripsi	

Syarat wajib setiap minimal 10 pertemuan/pembimbingan

Mahasiswa

Deasy Anwar Sagara  
 (Mahasiswa)

Mengetahui,

(P. Prodi)